

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

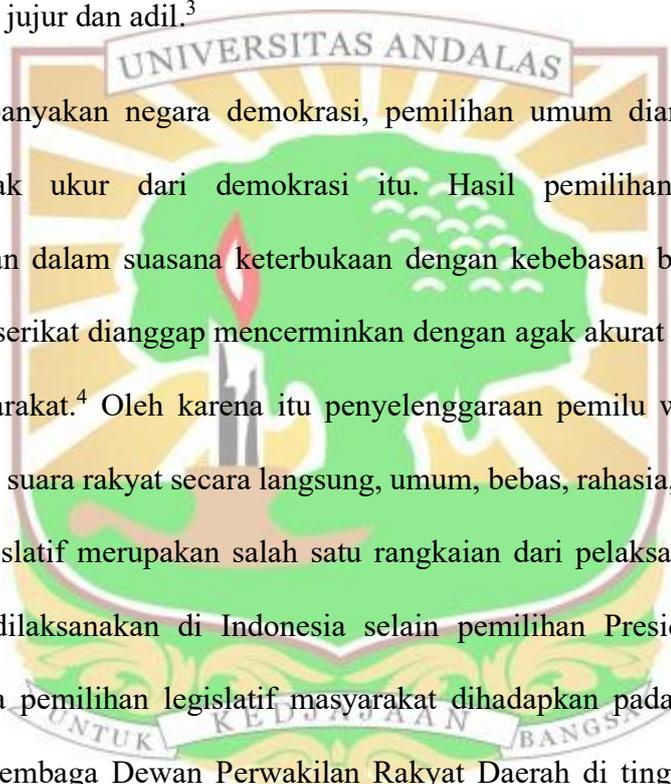
Fenomena demokrasi selalu menjadi pembahasan yang hangat di kalangan ilmuwan sosial khususnya politik. Demokrasi mengalami perubahan, baik dalam segi bentuk maupun substansi sesuai konteks dan dinamika tempat konsep demokrasi lahir dan berkembang.¹ Misalnya, Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakatnya dalam pemilihan umum tanpa adanya diskriminasi terhadap ras, suku, agama dan gender. Perubahan dan perkembangan demokrasi di Indonesia dalam konteks pemilu terlihat dari peningkatan partisipasi masyarakat, perlindungan hak suara tanpa diskriminasi, dan adanya lembaga pengawas independen yaitu Bawaslu yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan. Pemilu adalah aspek penting dalam demokrasi, sesuai dengan pernyataan Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.²

Penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih wakil rakyat di parlemen dan memilih pejabat tertentu yang duduk di lingkungan pemerintahan

¹ Muhammad Zulfan Hakim. 2010. "Demokrasi dalam Pilkada di Indonesia". *Laporan penelitian. Hukum tata Negara. Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin*. Hlm. 2

² Bambang Agus Windu S. 2019. "Dinamika Demokrasi di Indonesia". *Mimbar Administrasi FISIP Semarang* Vol 15 No 1 hlm 4

merupakan salah satu syarat berlangsungnya demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak memilih dan dipilih sendiri diatur dalam Pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.”³



Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.⁴ Oleh karena itu penyelenggaraan pemilu wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁵ Pemilihan legislatif merupakan salah satu rangkaian dari pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia selain pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pada pemilihan legislatif masyarakat dihadapkan pada pilihan calon-calon untuk Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Provinsi dan tingkat Kota dan juga calon-calon anggota DPD di tiap Provinsi.

Keterlibatan masyarakat dalam partisipasi saat pemilu menjadi kunci dalam perkembangan demokrasi kedepannya. Hubungan ini tentunya akan berpengaruh dengan setiap masyarakat yang mempunyai perilaku dan kepentingan

³ Undang-undang 39 Tahun 1999 Pasal 43 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴ Miriam Budiardjo. “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hlm. 461

⁵ Retno Sari Handayani, Khairul Fahmi. 2019. Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu serentak Tahun 2019. *Jurnal Hukum Media Bhakti*. Vol. 3 No 2. Hlm. 3

individu saat menentukan pilihannya pada saat pemilu. Perilaku memilih masyarakat pada saat memilih dapat didasarkan pada aspek-aspek sosiologis, psikologis maupun secara rasional.

Ramlan Surbakti mengatakan bahwa perilaku memilih adalah aktifitas pemberian suara oleh seseorang yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih (to vote), dengan dia akan memilih calon atau partai politik di suatu pemilu. Dan jika ia memutuskan untuk tidak akan memilih (not to vote), maka dia tidak ikut dalam memberikan suara di pemilu. Perilaku memilih dalam suatu pemilu ditunjukkan dengan memilih calon atau partai politik tertentu.⁶

Perilaku memilih ini dapat diurai dalam tiga pendekatan utama yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan pilihan rasional. Pertama, pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial berdasarkan pada usia, pendidikan, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal lainnya yang memberikan pengaruh pada pembentukan pilihan-pilihan politik. Kedua, pendekatan psikologis, menurut pendekatan ini para pemilih menentukan pilihannya terhadap seorang kandidat karena hasil dari sosialisasi yang diterima seseorang pada masa kecil, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan pertemanan dan sekolah yang sangat mempengaruhi pilihan politik mereka, khususnya pada saat pertama kali mereka memilih. Ketiga, pendekatan pilihan rasional yaitu menganggap seseorang memilih calon atau partai

⁶ Arifin, W. 2017. Perilaku Memilih dalam Pemilu. Indie Book Corner. Yogyakarta. Hlm. 56

apabila calon atau partai tersebut dipandang dapat membantu pemilih memenuhi kepentingan dasarnya yaitu kebutuhan ekonomi. Pada dasarnya, pendekatan pilihan rasional ini akan melihat bahwa pemilih yang rasional akan memilih partai atau calon yang menguntungkan bagi dirinya.⁷

Berdasarkan pada tiga pendekatan di atas, pada pendekatan psikologis dapat dilihat bahwa sikap seseorang menjadi sebuah aspek penting yang menjadi acuan yang dapat mempengaruhi pilihan pemilih. Sikap tersebut dapat lahir dari pengetahuan, pemahaman maupun nilai-nilai yang didapat dan dipahami oleh individu. Dalam politik, sikap seseorang pada saat memilih seorang calon termasuk kedalam orientasi kandidat. Orientasi kandidat dalam perilaku memilih dapat tergolong dalam pendekatan psikologis karena orientasi kandidat berhubungan dengan faktor ketokohan seseorang dalam politik.⁸ Contohnya seperti ketika seorang tokoh membuat sebuah gebrakan besar dalam politik seperti membentuk partai, menjadi ketua atau orang penting dalam sebuah lembaga besar maka daya tarik massa terhadap tokoh tersebut kemungkinan ditentukan oleh seberapa besar daya tarik tokoh tersebut bagi pemilih.

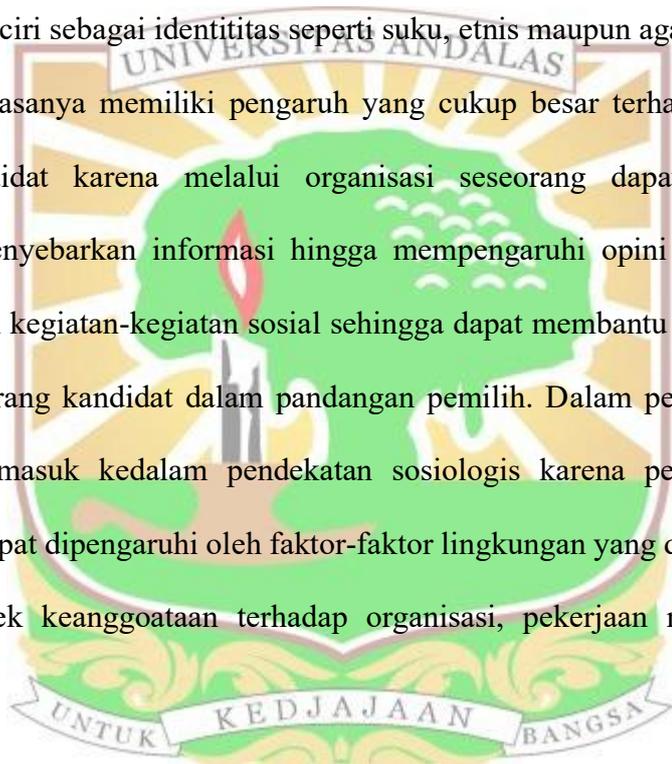
Orientasi kandidat pada konteks pemilu merujuk pada proses pemilih memberikan penilaian pada calon kandidat yang akan maju dalam pemilihan umum. Penilaian-penilaian tersebut dapat berdasarkan pada aspek-aspek tertentu

⁷ Khairul Azmi. 2014. Perilaku Memilih Pemilih Pemula Masyarakat Kendal Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. *Jurnal Of Politic and Government Studies*. Vol. 5 No. 3. Hlm. 4

⁸ Randy, P. P. 2021. "Pengaruh Political Trust, Efikasi Politik Dan Orientasi Kandidat Terhadap Partisipasi Politik, Masyarakat Multi Etnis Pada Pemilu Legislatif Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019". *Doctoral dissertation*, Universitas Andalas

seperti sikap, penampilan, profesi maupun jabatan yang dipilih oleh seorang kandidat. Selain orientasi kandidat, para pemilih juga dapat menentukan pilihan berdasarkan pada faktor lain seperti organisasi kemasyarakatan yang dimiliki oleh seorang calon maupun karena faktor-faktor kebelakang seperti kinerja kandidat sebelumnya.

Organisasi masyarakat merupakan organisasi sosial yang berlatar belakang atau memiliki ciri sebagai identitas seperti suku, etnis maupun agama. Organisasi masyarakat biasanya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap terpilihnya seorang kandidat karena melalui organisasi seseorang dapat memobilisasi dukungan, menyebarkan informasi hingga mempengaruhi opini publik melalui kampanye dan kegiatan-kegiatan sosial sehingga dapat membantu kredibilitas dan visibilitas seorang kandidat dalam pandangan pemilih. Dalam perilaku memilih, organisasi termasuk kedalam pendekatan sosiologis karena perilaku memilih masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang didalamnya juga termasuk aspek keanggotaan terhadap organisasi, pekerjaan maupun tempat tinggal.



Selain itu, masyarakat sebagai pemilih juga dapat menentukan pilihannya saat memilih berdasarkan pada aspek kinerja yang telah pernah dilakukan oleh calon yang telah pernah menjabat. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai retrospektif voter yang dapat diartikan sebagai pemilih yang memilih seorang kandidat biasanya tergantung pada kinerja masa lalu seorang kandidat ataupun membandingkan hasil kinerja kandidat yang satu dengan yang lainnya. Artinya, rekam jejak kinerja seorang kandidat sangat menentukan pilihan masyarakat saat memilih. Ketika

seorang tokoh membuat sebuah gebrakan besar dalam politik seperti membentuk partai, menjadi ketua atau orang penting dalam sebuah lembaga besar maka daya tarik massa terhadap tokoh tersebut kemungkinan ditentukan oleh seberapa besar daya tarik tokoh tersebut bagi pemilih. Oleh karena itu, tokoh kemungkinan besar mempunyai pengaruh terhadap perilaku memilih pemilih pada pemilu.

Selain ketiga pendekatan dan variabel tersebut, faktor Status Sosial Ekonomi (SSE) juga merupakan salah satu determinan penting dalam perilaku memilih masyarakat. SSE mengacu pada kondisi ekonomi dan posisi sosial individu dalam masyarakat yang umumnya diukur melalui indikator seperti pendapatan, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan.⁹ SSE tidak hanya memengaruhi akses dan peluang individu terhadap informasi politik, tetapi juga membentuk preferensi politik, cara pandang terhadap sistem pemilu, serta sikap dalam menilai calon kandidat.

Dalam konteks pemilu, individu dengan SSE tinggi cenderung memiliki kapasitas literasi politik yang lebih baik, memiliki kecenderungan untuk berpikir kritis terhadap program kandidat, dan lebih rasional dalam menentukan pilihan politiknya.¹⁰ Sebaliknya, mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah kerap kali lebih rentan terhadap mobilisasi politik berbasis sentimen emosional, tokoh lokal, atau bahkan praktik *vote buying*. Hal ini sejalan dengan temuan Syaiful Mujani yang menunjukkan bahwa latar belakang

⁹ Verba, Sidney, Schlozman, Kay Lehman, & Brady, Henry E. *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press, 1995

¹⁰ Fiorina, Morris P. *Retrospective Voting in American National Elections*. Yale University Press, 1981

pendidikan dan pekerjaan memiliki pengaruh signifikan terhadap preferensi politik masyarakat Indonesia.¹¹

Di Indonesia, setelah turunnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya sudah dilaksanakan pemilu sebanyak enam kali yaitu tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan yang terbaru adalah pada Februari 2024 lalu. Dengan telah dilaksanakannya pemilu sebanyak lima kali sebelum pemilu 2024 ini sangat diharapkan prosesnya dapat berjalan dengan lancar karena telah memakan biaya yang besar dan waktu yang panjang. Namun, pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia tidak selalu memberikan hasil yang baik seperti pada tahun 2019 setidaknya terdapat 2.767 tempat pemungutan suara harus melaksanakan pemungutan suara lanjutan, pemungutan suara susulan hingga pemungutan suara ulang yang diakibatkan oleh banyak faktor seperti ketidakpahaman anggota KPPS, adanya tekanan dari pengawas lapangan hingga tekanan dari para pemilih itu sendiri. Hal ini juga dapat dilihat pada pemilihan umum pada tahun 2024 saat ini, terdapat banyak konflik yang terjadi pada saat proses pemungutan suara hingga pada proses rekapitulasi hasil pemungutan suara.

Pada pemilihan umum calon Presiden, Wakil Presiden dan Legislatif tahun 2024 ini terdapat sebuah permasalahan yang muncul setelah dilaksanakannya pemungutan suara pada bulan Februari lalu. Salah satu permasalahan yang muncul adalah keluarnya putusan MK 03/03/PHPU.DPD-XXII2024 yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang

¹¹ Mujani, Syaiful. "Voting Behavior in Indonesia: Evidence from the 2004 Election." *Journal of East Asian Studies*, vol. 9, no. 1, 2009, pp. 25–56

(PSU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Barat. Pada akhirnya, pemungutan suara ulang DPD Provinsi Sumatera Barat memang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2024 lalu sebagai bentuk kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Pelaksanaan pemungutan suara ulang DPD Provinsi Sumatera Barat ini didasari oleh adanya tuntutan salah satu calon anggota DPD yang dicoret namanya dari Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu dilaksanakan kembali pemungutan suara ulang di wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan mengikutkan kandidat tersebut dengan total kandidat untuk DPD sebanyak 16 orang, berbeda dengan pemungutan suara serentak Februari 2024 lalu hanya 15 orang . Hal ini tentunya berpengaruh pada partisipasi dan perilaku memilih masyarakat karena dilaksanakan sebanyak dua kali pada jangka waktu yang relatif cepat. Dengan adanya pemungutan suara ulang ini tentunya masyarakat dapat kembali merubah pilihannya yang sebelumnya memilih kandidat X bisa saja berubah memilih kandidat Y sesuai dengan kepercayaan pemilih itu sendiri.

Penelitian tentang perilaku memilih telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya di antaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ayu Amanda A'isyatul Khumairo dan Muhammad Asfar¹², Meike Kurniawati¹³, Alfon Apriel

¹² Ayu Amanda A'isyatul Khumairo, Muhammad Asfar. 2020. Perilaku Memilih Masyarakat pada Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020. *Jurnal Politik Indonesia*. Vol. 9. No, 2

¹³ Meike Kurniawati. (2023). Pengaruh Keluarga, Tokoh Agama dan Teman terhadap Perilaku Memilih para Pemilih Pemula. *Jurnal Ilmiah Psikologi Mind Set Khusus Tin*. Vol. 2 No. 1

Simanullang¹⁴, Rino Adi Prasetyo¹⁵ dan Syahirah Atikah Saferlin¹⁶ yang sama-sama melakukan penelitian tentang perilaku pemilih dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan dan menjadi keterbaruan dalam penelitian ini yaitu variabel yang akan diteliti lebih bervariasi yaitu adanya variabel status sosial ekonomi yang digunakan untuk melihat orientasi kandidat, keanggotaan dalam organisasi dan retrospektif voter dalam konteks perilaku pemilih Irman Gusman. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan juga terfokus pada perilaku memilih masyarakat Kota Padang pada satu tokoh yaitu Irman Gusman pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) tahun 2024 lalu.

1.2 Rumusan Masalah

Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD Provinsi Sumatera Barat pada Juli 2024 mengikutsertakan kandidat baru yaitu Irman Gusman sebagai calon anggota DPD sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Irman Gusman yang merupakan mantan ketua DPD dua periode dari tahun 2009-2016. Namun, ditengah-tengah jabatannya tersebut terjerat kasus korupsi pada tahun 2016 yang ditangkap oleh KPK melalui operasi tangkap tangan dengan status tersangka kasus korupsi impor gula perum bulog. Dia terbukti telah menerima suap sebesar Rp. 100

¹⁴ Alfon Apriel Simanullang, dkk. 2023. Analisis Perilaku Memilih Masyarakat untuk Pemilu 2024 Di Tinjau Dari Perilaku Memilih Masyarakat Dalam Pilres 2019 (Studi Kasus Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin). *Jurnal Majalah Ilmiah Methoda*. Volume 13, Nomor 2 Mei-Agustus 2023

¹⁵ Rino Adi Prasetyo. 2024. Perilaku Memilih Masyarakat Kabupaten Dharmasraya Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019. *Skripsi*. Padang : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

¹⁶ Syahirah Atikah Saferlin. 2024. Hubungan Tingkat Kepercayaan Politik Kepada Calon Legislatif Perempuan Terhadap Perilaku Memilih Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Padang. *Skripsi Sarjana Universitas Andalas*

Juta guna memuluskan CV Semesta Berjaya mendapatkan kuota distribusi tambahan gula kepada Perum Bulog untuk wilayah Sumbar. Pada akhirnya Irman dipenjara selama 3 tahun dimulai dari September 2016 sampai September 2018.

Kemudian, pada 2023 dia mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD RI yang lantas ditolak oleh KPU Provinsi Sumatera Barat karena dianggap tidak memenuhi syarat karena narapidana yang belum genap lima tahun bebas dari penjara belum boleh mengikuti pemilu berdasarkan aturan Mahkamah Agung Nomor 28 Tahun 2023. Hal tersebut yang mengakibatkan nama Irman Gusman dicoret dari Daftar Calon tetap (DCT) dan tidak dapat ikut serta pada pemungutan suara legislatif pada Februari lalu.

Namun, pada bulan April Irman mengajukan tuntutan sengketa pemilihan Legislatif tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi terkait permasalahan tersebut. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa seharusnya KPU menindaklanjuti putusan PTUN Jakarta 600/2023 yaitu mencabut keputusan KPU 1563/2023 dan selanjutnya menerbitkan keputusan tentang penetapan pemohon masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD Provinsi Sumatera Barat. Pada akhirnya, Juni 2024 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang DPD Provinsi Sumatera Barat. KPU menurut Mahkamah Konstitusi dianggap tidak patuh dalam menindaklanjuti putusan pengadilan yang menimbulkan ketidakpastian, menunda keadilan, dan menurunkan kewibawaan institusi peradilan, dan keterkaitannya dengan pemohon (Irman Gusman) ketidakpatuhan tersebut telah mencederai hak konstitusional warga negara yang

seharusnya telah memenuhi syarat untuk dipilih. Oleh sebab itu, maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk memulihkan hak konstitusional warga negara yang telah memenuhi syarat untuk dipilih dalam kontestasi pemilu DPD dan kepastian hukum yang adil maka memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang.

Adapun perolehan suara pada pemilihan anggota DPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebelum dilakukannya pemungutan suara ulang yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara DPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Nama Caleg	Perolehan Suara
H. Abdul Aziz, SP., M.M	246.620
Cerint Irraloza Tasya, S. Ked	489.942
Desrio Putra	144.474
Dirri Uzhzhulan, (ELOK)	133.362
Hj. Emma Yohana	377.605
Ir. H. Hendra Irwan Rahim, M.M	131.685
H. Jelita Donal, Lc	308.986
Drs. Jhoni Afrizal, DT. HITAM	78.013
H. Leonardy Harmainy, DT, Bandaro Basa	166.525
Mevrizal, S.H, M.H	64.240
H. Muslim M Yatim, Lc., M.M	275.203
Nurkhalis, S.H	224.195
Yonder WF Alvarent	21.643
Yong Hendri, S.H, DT. Paduko Reno	55.446
Hj. Yuri Hadiah, S.H	147.454

Sumber : Diolah dari data KPU Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara DPD

Setelah dilaksanakannya pemungutan suara ulang pada Juli 2024 dengan mengikutsertakan Irman Gusman sebagai calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat maka dapat dilihat pada tabel berikut rekapitulasi hasil perhitungan suara yaitu :

Tabel 1.2
Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Nama Caleg	Perolehan Suara
H. Abdul Aziz, SP., M..M	66.192
Cerint Irraloza Tasya, S. Ked	283.020
Desrio Putra	32.150
Dirri Uzhzhulan, (ELOK)	44.844
Hj. Emma Yohana	122.547
Ir. H. Hendra Irwan Rahim, M.M	35.064
Irman Gusman	176.987
H. Jelita Donal, Lc	187.765
Drs. Jhoni Afrizal, DT. HITAM	16.028
H. Leonardy Harmainy, DT, Bandaro Basa	34.674
Mevrizal, S.H, M.H	16.532
H. Muslim M Yatim, Lc., M.M	199.919
Nurkhalis, S.H	144.339
Yonder WF Alvarent	12.199
Yong Hendri, S.H, DT. Paduko Reno	14.895
Hj. Yuri Hadiah, S.H	51.990

Sumber : Diolah dari data KPU Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang DPD

Berdasarkan pada hasil rekapitulasi tersebut, maka dapat dilihat bahwa Irman Gusman masuk kedalam 4 caleg yang mendapatkan suara terbanyak pada pemungutan suara ulang DPD Provinsi Sumatera Barat tersebut dan dapat duduk kembali menjadi anggota DPD. Hal ini tentunya cukup menjadi perhatian bagi publik karena melihat latar belakang Irman Gusman yang pernah terjerat kasus korupsi dan telah ditetapkan menjadi tersangka namun masih dapat memperoleh suara terbanyak ke empat pada PSU DPD tersebut. Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah Irman Gusman dapat mengalahkan calon petahana yaitu Emma Yohanna yang telah menjabat sebagai anggota DPD sebanyak tiga periode.

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa adanya perbedaan hasil pemungutan suara yang dilakukan pada bulan Februari dengan pemungutan suara ulang yang dilakukan pada Juli, terlihat perbedaan caleg yang memiliki suara

terbanyak. Pada pemungutan suara yang dilakukan Februari lalu Emma Yohanna berhasil menduduki suara terbanyak kedua setelah Cerint Irralozza Tasya yang berbanding terbalik dengan hasil pemungutan suara ulang yang telah dilakukan yang menunjukkan bahwa Emma Yohanna sebagai petahana tidak dapat kembali duduk di DPD.

Tabel 1.3
Presentase Pemilih Irman Gusman Di Provinsi Sumatera Barat



Kabupaten / Kota	Jumlah Pemilih	Presentase
Bukittinggi	3.304	7%
Padang Panjang	3.783	4%
Padang	26.444	10%
Pariaman	2.829	10%
Payakumbuh	3.509	9%
Sawahlunto	2.287	8%
Solok	2.317	7%
Agam	19.063	7%
Dharmasraya	7.299	8%
Kep. Mentawai	2.929	10%
Lima Puluh Kota	9.128	13%
Padang Pariaman	8.123	15%
Pasaman Barat	11.193	9%
Pasaman	12.311	7%
Pesisir Selatan	9.466	15%
Sijunjung	14.232	5%
Solok Selatan	7.265	6%
Kab Solok	11.169	10%
Tanah Datar	19.551	5%

Sumber : Diolah dari data KPU Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang DPD

Selanjutnya berdasarkan pada tabel 1.3 di atas maka peneliti memilih 1 Kota yaitu Kota Padang dan 1 Kabupaten yaitu Kabupaten Padang Pariaman sebagai lokasi dalam penelitian ini. Alasan peneliti memilih Kota Padang adalah pemilih Irman Gusman terbesar berada di Kota Padang, selain itu basis dukungan Irman Gusman juga di Kota Padang. Kemudian, alasan peneliti memilih Kabupaten Padang Pariaman adalah diantara 12 Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Barat,

di Kabupaten Padang Pariaman termasuk pada Kabupaten dengan pemilih Irman Gusman yang besar diantara Kabupaten atau Kota lainnya. Oleh karena ini peneliti memilih Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman.

Selain itu, untuk memahami faktor yang memengaruhi perilaku memilih masyarakat terhadap kandidat tersebut, peneliti menambahkan analisis berbasis Status Sosial Ekonomi (SSE). SSE dalam penelitian ini dilihat melalui tiga indikator utama, yakni tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat pengeluaran atau pendapatan masyarakat, yang ketiganya secara umum berpengaruh terhadap cara individu mengakses informasi politik, menilai kredibilitas kandidat, hingga menentukan pilihan politiknya dalam pemilu.

Kota Padang sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan karakteristik SSE yang lebih tinggi dibanding daerah kabupaten. Berdasarkan data BPS tahun 2024, sekitar 30,62% penduduk Kota Padang merupakan lulusan SMA/ sederajat, dan lebih dari 7% merupakan lulusan pendidikan tinggi (D3, S1, S2). Di sisi lain, kelompok yang tidak/belum sekolah masih mencapai 22,58%, menunjukkan kesenjangan pendidikan yang cukup mencolok antar kelompok sosial ekonomi di kota tersebut.¹⁷ Dari segi jenis pekerjaan, mayoritas masyarakat Kota Padang bekerja di sektor jasa, perdagangan, transportasi, pemerintahan, dan pendidikan. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kota Padang berada pada kisaran Rp1.670.000–1.950.000 per bulan, menempatkan kota ini dalam kelompok ekonomi menengah ke atas di

¹⁷ Badan Pusat Statistik Kota Padang. (2024). *Kota Padang Dalam Angka 2024*. Padang: BPS Kota Padang.

Sumatera Barat.¹⁸ Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa masyarakat dengan SSE tinggi cenderung memiliki kapasitas rasional dalam menilai kandidat berdasarkan orientasi personal dan juga memiliki kecenderungan retrospektif dalam menilai rekam jejak dan pengalaman kandidat seperti Irman Gusman.

Selain itu, Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan profil SSE yang berbeda. Daerah ini mencerminkan karakteristik semi-perkotaan dan semi-pedesaan. Menurut data BPS tahun 2023, sekitar 26% penduduk hanya berpendidikan SD, 12% lulusan SMP, dan hanya sekitar 10–11% penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih berada pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah. Mayoritas mata pencaharian masyarakat di Padang Pariaman adalah petani, nelayan, pedagang kecil, dan pelaku usaha informal, dengan sebagian bekerja sebagai ASN, guru, atau pekerja sektor jasa. Dari sisi ekonomi, rata-rata pengeluaran per kapita di daerah ini tercatat sekitar Rp1.280.000–1.500.000 per bulan.²⁰ Dengan kondisi SSE tersebut, preferensi politik masyarakat cenderung dibentuk oleh relasi sosial-komunal, nilai-nilai tradisional, dan afiliasi kolektif seperti keanggotaan dalam organisasi keagamaan. Dukungan dari Muhammadiyah terhadap Irman Gusman kemungkinan besar memiliki pengaruh kuat terhadap basis pemilih di daerah ini, mengingat pengaruh organisasi keagamaan masih sangat

¹⁸ *Ibid*, hlm. 117-119

¹⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman. (2023). *Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka 2023*. Pariaman: BPS Kabupaten Padang Pariaman.

²⁰ *Ibid*, hlm 132-135

besar dalam membentuk pilihan politik masyarakat yang SSE-nya menengah ke bawah.

Oleh karena adanya perbedaan karakteristik SSE dari kedua lokasi di atas, menjadi alasan kuat bagi peneliti untuk memilih Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman sebagai lokasi penelitian. Variasi kondisi sosial ekonomi antarwilayah ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam bagaimana aspek orientasi kandidat, keanggotaan organisasi, dan retrospektif voter memengaruhi perilaku memilih masyarakat dalam konteks sosial ekonomi yang berbeda.

Dukungan yang diberikan kepada Irman Gusman sebelum diadakannya PSU dari organisasi Muhammadiyah dapat dilihat berdasarkan pertanyaan oleh Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah yaitu Anwar Abbas.

“Pak Irman (Gusman), saya kira sosok yang pas. Kalau calon lain tidak begitu nampak”²¹

Sejalan dengan hal tersebut, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat merekomendasikan warga Muhammadiyah untuk memilih Irman Gusman dalam PSU DPD daerah pemilihan Sumbar. Menurut pihak Muhammadiyah, Irman adalah kader Muhammadiyah yang maju di tingkat nasional, tidak hanya mewakili Muhammadiyah namun juga mewakili seluruh masyarakat Sumbar apalagi Irman telah memiliki pengalaman saat menjadi Ketua DPD RI. Oleh karena itu, menurutnya diperlukan tokoh yang memiliki kemampuan

²¹ Sapto Yunus. Alasan Muhammadiyah Rekomendasikan Warganya Pilih Irman Gusman DI PSU DPD Sumbar. Diakses pada 25 Juli 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1885440/alasan-muhammadiyah-rekomendasikan-warganya-pilih-irman-gusman-di-psu-dpd-sumbar>

yang baik, jaringan yang luas di tingkat pusat maupun internasional.²² Selain itu, Wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat yaitu Yosmeri juga membenarkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, pimpinan ortom hingga amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah agar menginformasikan kepada warga Muhammadiyah untuk memilih Irman Gusman.

”Kami dari pimpinan wilayah menghimbau seluruh warga perserikan untuk memilih pak Irman yang direkomendasikan oleh Muhammadiyah dan juga Aisyiah”²³

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa Irman Gusman mendapat dukungan dari organisasi yang memiliki pengaruh besar bagi masyarakat. Oleh karena itu hal ini juga dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terpilihnya Irman Gusman kembali menjadi anggota DPD Provinsi Sumatera Barat pada pemilu tahun 2024 ini. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang memilih Irman Gusman pada pemungutan suara ulang DPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.

”Saya pilih nomor 7 ini (Irman Gusman) karena dari perawakan kayak rapi, bersih, tegas terus juga kayak orang kaya. Dibandingkan calon-calon lain namanya juga lebih familiar sama saya”.²⁴

Merujuk pada hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat dapat menentukan pilihannya kepada seorang kandidat berdasarkan pada aspek

²² *Ibid.*

²³ Fauzi. Muhammadiyah : Irman Gusman sosok pas dapatkan rekomendasi Pileg DPD. Antara News. Diakses pada 6 Januari 2025. <https://www.antaraneews.com/berita/4173351/muhammadiyah-irman-gusman-sosok-pas-dapatkan-rekomendasi-pileg-dpd>

²⁴ Wawancara dengan Informan Rahayu Suci Ramadhani. Pada tanggal 6 Januari 2025 pukul 19.00 WIB

seperti penampilan, sifat dan juga perawakan tokoh dari luar yang termasuk kedalam bagian dari orientasi kandidat. Selaras dengan hal tersebut peneliti juga melakukan wawancara dengan informan lain untuk melihat faktor lain yang menentukan pemilih menentukan pilihannya.

”Ibuk piliah pak Irman ko yo karna ibuk dan suami memang ikut Muhammadiyah. Pak Irman ko kan urang Muhammadiyah lo makonyo ibuk piliah urang awak. Selain itu kan pak Irman ko alah pernah lo menjabat sebelumnya jadi ketua DPD tu nyo banyak pengalamannyo dalam memberikan manfaat untuk sumbar ko kan, jadi ibuk rasa nyo layak lo untuk dipiliah apalagi nyo alah berjuang lo patang kan makonyo ado PSU ko.”

(Saya pilih pak Irman karena saya dan suami memang ikut Muhammadiyah. Pak Irman kan juga orang Muhammadiyah makanya saya pilih dia. Selain itu kan pak Irman juga sudah pernah menjabat jadi ketua DPD tentunya banyak pengalamannya yang telah memberikan manfaat untuk masyarakat sumbar, jadi saya rasa dia memang layak untuk dipilih apalagi dia sudah berjuang kemarin makanya ada PSU ini).²⁵

Berdasarkan pada wawancara di atas dapat dilihat bahwa seorang pemilih dapat memilih seorang kandidat berdasarkan pada organisasi yang mendukung kandidat tersebut. Selain itu, faktor lain juga mempengaruhi yaitu pemilih yang membuat keputusan berdasarkan pada track record dari Irman Gusman pada saat menjabat sebagai ketua DPD (retrospektif voter). Retrospektif voter merujuk pada pemilih yang memilih seorang kandidat berdasarkan pada pengalaman maupun informasi dari masa lalu. Dalam konteks ini, pemilih biasanya mempertimbangkan hasil dan dampak kebijakan yang sudah diterapkan oleh kandidat yang akan dipilih. Selain itu, berdasarkan pada hasil wawancara tersebut juga dapat dilihat bahwa pemilih yang memilih Irman Gusman juga berdasarkan pada pengalaman pada saat

²⁵ Wawancara dengan Informan Anggraini. Pada tanggal 7 Januari 2025 pukul 10.30 WIB

menjabat sebelumnya. Oleh karena itu aspek retrospektif voter juga menjadi salah satu bagian dari variabel yang akan diteliti.

Hal ini tentunya menjadi fenomena yang menarik untuk dibahas karena dapat dilihat bahwa seorang mantan tersangka kasus korupsi masih mendapat kepercayaan dari masyarakat dan mendapat dukungan yang besar dari salah satu organisasi besar untuk kembali duduk di DPD Provinsi Sumatera Barat mengalahkan petahana yang awalnya telah memperoleh suara terbanyak kedua pada pemungutan suara serentak pada Februari 2024.

Berdasarkan pada pemaparan pernyataan dan fenomena yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti berasumsi bahwa Irman Gusman masih dipilih oleh masyarakat untuk menjadi anggota DPD karena beberapa faktor diantaranya : orientasi kandidat yaitu menilai Irman berdasarkan pada penampilan maupun sifat. Kemudian faktor keanggotaan dalam organisasi juga menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi pilihan masyarakat. Terakhir karena faktor kinerja di masa lalu pada saat menjabat juga menjadi faktor seseorang dalam menentukan pilihannya (retrospektif voter). Hal tersebut dibuktikan dengan kinerja Irman Gusman pada saat menjabat yaitu dapat dilihat pada terpilihnya Irman sebagai anggota DPD sebanyak dua periode dan menjabat sebagai Ketua DPD dari tahun 2014-2016. Selain itu, Irman Gusman juga mendapatkan gelar "*Sangsako Adat Tuanku Besar Palinduang Alam*" oleh Daulat yang Dipertuan Rajo Alam Minangkabau Pagaruyung Darul Qorror, Sultan Muhammad Taufiq Thaib Tuanku Mudo Mahkota Alam karena dinilai telah memberikan kontribusi yang besar kepada bangsa dan negara khususnya Sumatera Barat. Selain itu Irman Gusman dan keluarganya juga

memberikan dukungan penuh untuk organisasi minang di rantau.²⁶ Oleh sebab itu, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hubungan antara status sosial ekonomi (SSE) dengan orientasi kandidat pemilih Irman Gusman pada PSU DPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024?
2. Bagaimana hubungan antara status sosial ekonomi (SSE) dengan keanggotaan dalam organisasi pemilih Irman Gusman PSU DPD Sumatera Barat tahun 2024?
3. Bagaimana hubungan antara status sosial ekonomi (SSE) dengan retrospektif voter pemilih Irman Gusman pada PSU DPD Sumatera Barat tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan status sosial ekonomi dengan orientasi kandidat, keanggotaan dalam organisasi dan retrospektif voter terhadap perilaku memilih pemilih Irman Gusman pada pemungutan suara ulang DPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

²⁶ Ronaldo Axel. Irman Gusman Kembali Terpilih Jadi anggota DPD RI, Bukti Kecerdasan dan Kecintaan Masyarakat Sumbar. Bijak News 21 juli 2024. [Irman Gusman Kembali Terpilih jadi Anggota DPD RI, Bukti Kecerdasan dan Kecintaan Masyarakat Sumbar - BijakNews.com: Mengabarkan Informasi dengan Bijak dan Akurat](https://www.bijaknews.com/irman-gusman-kembali-terpilih-jadi-anggota-dpd-ri-bukti-kecerdasan-dan-kecintaan-masyarakat-sumbar)

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu khususnya Ilmu Politik yang berkaitan dengan status sosial ekonomi (SSE) masyarakat, orientasi kandidat, organisasi dan retrospektif voters masyarakat kepada calon legislatif pada pemungutan suara ulang dan melihat perilaku memilih masyarakat tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan mengenai hubungan status sosial ekonomi dengan orientasi kandidat, keanggotaan dalam organisasi dan retrospektif voter terhadap perilaku memilih serta penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber tambahan bagi para peneliti yang akan meneliti mengenai perilaku memilih dan juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku memilih masyarakat.
2. Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru baik bagi para politisi maupun kepada masyarakat umum dan dapat dijadikan bahan kajian akademis untuk peneliti selanjutnya.

